

DESENTRALISASI FISKAL DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI: STUDI PERBANDINGAN KAWASAN SULAWESI DAN JAWA

Muh. Amir Arham
amier_archam@yahoo.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRACT

Fiscal decentralization policies by giving greater authority to the regions to create efficiency and effectiveness to provide public goods, because the area is considered better understand the preferences of the community. Besides, fiscal decentralization policies can accelerate economic growth and changes in economic structure that has a devastating impact on the region is still considered backward. In general, backward areas still rely on primary sectors such districts/municipalities in Sulawesi, while the districts/municipalities in Java, relying on non-primary sector tends to be more advanced. Therefore, in general the economy is still underdeveloped Sulawesi compared to Java. The purpose of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization on economic structural change districts/municipalities by comparing the two areas considered different economic structure, Sulawesi and Java. By using a panel analysis of data from 2001-2010 results showed that the fiscal decentralization policies has no effect on changes in the economic structure in Sulawesi. Java, while in the region shows that the negative effect of fiscal decentralization, it means diminishing the role of the primary sector, which leads to changes in the economic structure.

Key words: Fiscal Decentralization, Structure Changes and Comparative Studies

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi fiskal dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas untuk menyediakan barang publik, karena daerah dianggap lebih memahami preferensi masyarakatnya. Disamping itu kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong percepatan perkembangan ekonomi serta perubahan struktur ekonomi yang memiliki dampak luas bagi daerah yang dianggap masih terbelakang. Pada umumnya daerah terbelakang masih bertumpu pada sektor primer seperti kabupaten/kota yang ada di Sulawesi, sementara kabupaten/kota yang ada di Jawa mengandalkan sektor non primer cenderung lebih maju. Oleh sebab itu secara umum perekonomian wilayah Sulawesi masih terbelakang dibandingkan dengan wilayah Jawa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perubahan struktur ekonomi kabupaten/kota dengan membandingkan dua kawasan yang dianggap struktur ekonominya berbeda, yakni Sulawesi dan Jawa. Dengan menggunakan metode analisis panel data periode 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi di Sulawesi. Sementara di kawasan Jawa menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif, artinya peranan sektor primer makin menurun sehingga berdampak terhadap perubahan struktur ekonomi.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Perubahan Struktur dan Studi Perbandingan

PENDAHULUAN

Pelimpahan fungsi administrasi lokal di Indonesia atau desentralisasi bukan konsep baru di Indonesia, sudah ada sejak zaman Hindia Belanda (Matsui, 2003:4). Pada tahun

1995 pemerintah pusat mencoba mendesain desentralisasi percontohan di 26 kabupaten seluruh Indonesia dengan masing-masing satu kabupaten per provinsi. Akan tetapi prakteknya, kebijakan desentralisasi selama

pemerintahan Orde Baru, yang disertakan alokasi anggaran pemerintah tidak menjadi insentif mengurangi ketimpangan antar daerah dan wilayah, serta lambatnya proses perubahan struktur ekonomi di luar Jawa karena masih tingginya derajat sentralisasi fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas pada awal tahun 2001 terjadi pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralistik kearah desentralistik dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan desentralisasi. Ada dua masalah pokok dari pelaksanaan desentralisasi, yaitu redistribusi kewenangan di bidang pemerintahan dan ekonomi (desentralisasi fiskal). Prinsip pelaksanaan desentralisasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah (Mardiasmo, 2009:562).

Menurut amanah UU Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan (urusan) yang lebih besar untuk merencanakan arah pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada. Dengan adanya kewenangan yang besar disertakan transfer keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sekaligus dapat mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi diperlukan sebab jika hanya mengandalkan sektor primer nilai tambah yang dihasilkan dari sektor tersebut relatif kecil dibandingkan dengan industri pengolahan (sektor sekunder), disamping itu jika daerah terlalu mengandalkan sektor primer sebagai mesin perekonomian cenderung akan menciptakan ketimpangan. Kondisi ini akan memberikan implikasi terhadap konsumsi dan tabungan (investasi) masyarakat yang rendah. Selanjutnya akan berdampak terhadap

basis pajak daerah yang seharusnya untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaan desentralisasi perubahan struktur ekonomi akselerasinya tidak akan sama karena adanya perbedaan sumber daya (*endowment factor*) yang dimiliki. *Endowment factor* yang dimaksudkan bukan hanya menyangkut SDA akan tetapi juga menyangkut masalah struktur ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Perubahan karakteristik ekonomi daerah yang memiliki kekayaan SDA dan SDM serta keterbukaan ekonomi cenderung lebih cepat berkembang, seperti yang ditunjukkan hasil studi Hammond dan Tossun (2011) di USA menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif dan signifikan terhadap daerah metropolitan (pusat industri dan jasa) serta terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun tidak signifikan bagi daerah nonmetropolitan.

Masalah lain yang perlu dicermati adanya perbedaan *endowment factor*, selain berpotensi memperparah ketimpangan antar daerah juga akan mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal ke daerah inti, serta tidak berjalannya mekanisme trickle down effect justru sebaliknya yang terjadi backwash effects. Dalam pelaksanaan desentralisasi, ketidakmerataan SDA antar daerah maka pemerintah pusat melakukan penyeimbangan transfer (*equalizing transfer*), namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengurangi ketimpangan dan karakteristik ekonomi masih senjang antar kawasan, serta minimnya dampak terhadap perubahan struktur ekonomi di kawasan Sulawesi.

Dalam konteks kajian perbedaan kemampuan ekonomi, di mana daerah yang relatif lebih maju pada umumnya sektor non pertanian lebih dominan berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilakukan pemetaan perbedaan kemampuan ekonomi di Indonesia, umumnya selama ini dilaku-

kan pembagian didasarkan kawasan Jawa dan luar Jawa, atau Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). PDRB per kapita Jawa secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa. Tapi uniknya dalam menghadapi krisis ekonomi, luar Jawa (termasuk Sulawesi) lebih kuat dibandingkan dengan kawasan Jawa. Pada saat krisis tahun 1998 PDRB perkapita luar Jawa lebih tinggi, karena harga komoditi SDA meningkat atau pangsa primer meningkat. Sebelum krisis PDRB per kapita Jawa adalah pada tahun 1998 Rp. 2,1 juta turun drastis menjadi lebih kurang Rp. 1,7 juta, sementara luar Jawa meskipun PDRB perkapita turun akan tetapi penurunannya relatif kecil. PDRB per kapita luar Jawa sebelum krisis Rp. 1,9 juta pada tahun 1998 turun sebesar Rp. 1,8 juta.

Gambaran ini mengindikasikan terjadinya ketimpangan dan kemampuan antar kawasan sangat berbeda, bahkan cenderung mencolok satu sama lain kondisi perekonomiannya. Atas dasar itu diperlukan kebijakan desentralisasi, sebab salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi, yakni mengatasi masalah struktur perekonomian yang dapat mengoreksi ketimpangan. Tetapi sekalipun desentralisasi fiskal sudah diimplementasikan selama 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan peranan wilayah/pulau struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2006 sampai tahun 2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi

di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata di atas 50%, sementara Pulau Sulawesi yang dianggap sebagai representatif dari KTI sumbangannya terhadap pembentukan PDB hanya rata-rata 4,5% (BPS, 2011). Secara rinci perbandingan peranan antar kawasan dapat disimak pada tabel 1.

Rendahnya kontribusi kawasan Sulawesi terhadap PDB salah satu penyebabnya karena pangsa sektor primer (pertanian) masih dominan, berkontribusi terhadap PDRB terbesar (30%), itupun tumbuh dengan lambat padahal kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50% tenaga kerja. Rendahnya kapasitas ekonomi Sulawesi sebagai dampak dari rendahnya investasi baik yang berasal dari dalam dan luar negeri dibandingkan daerah lain. Ini makin diperparah ketersediaan infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang memadai (Bappenas, 2011). Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal pencapaiannya belum maksimal untuk mendorong perubahan struktur ekonomi, khususnya di kawasan Sulawesi. Bahkan hasil studi Pepinsky dan Wihardja (2009:42) menemukan minimnya efek positif desentralisasi terhadap pembangunan di Indonesia. Meski tidak dapat dipungkiri kawasan Jawa juga mengalami hal serupa, dampak desentralisasi belum optimal.

Tabel 1
Peranan Kawasan Terhadap Pembentukan PDB, 2006 - 2010 (Persen)

No	Kawasan	Kontribusi/Tahun (%)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Sumatera	23,2	23,2	22,5	22,6	23,1
2	Jawa	58,5	58,2	58,2	58,6	58,0
3	Bali-Nusa Tenggara	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7
4	Kalimantan	9,3	9,8	9,6	9,2	9,2
5	Sulawesi	4,3	4,3	4,6	4,6	4,6
6	Maluku-Papua	2,2	2,0	2,4	2,3	2,4
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji masalah kebijakan desentralisasi fiskal yang berpengaruh pada perubahan struktur selama pelaksanaan otonomi daerah. Untuk keperluan studi ini dilakukan komparasi, diambil sampel kawasan yang dianggap relatif sudah maju (Jawa) dan kawasan yang masih terbelakang struktur ekonominya (Sulawesi). Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya, yaitu apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perubahan struktur di kabupaten/kota di Sulawesi dan Jawa selama pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya melihat variabel apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi di Sulawesi dan Jawa. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perubahan struktur ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi dan Jawa selama pelaksanaan otonomi daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Desentralisasi Fiskal

Menjelaskan masalah desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dengan konsep desentralisasi secara umum yang di dalamnya menyangkut masalah administratif dan politis. Oleh karena itu mendefinisikan desentralisasi fiskal akan selalu berkaitan satu sama lain ketiga hal tersebut, dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan desentralisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi politik merupakan tonggak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi melalui pelimpahan kewenangan di bidang fiskal (Mardiasmo, 2009:563).

Secara prinsipil ketiga jenis desentralisasi tersebut semua menekankan pelimpahan

an kewenangan ke pemerintah daerah, diikuti oleh pembiayaan dari pemerintah pusat. Maka dari itu desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintahan daerah (Litvack *et al.*, 1998:8). Mencermati ketiga jenis desentralisasi penjabarannya cukup luas, maka uraian selanjutnya lebih fokus mengkaji masalah desentralisasi fiskal. Dimana desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah lainnya, serta perbaikan pelayanan publik, efisiensi pemanfaatan sumber daya, disamping itu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam tataran lebih aplikatif, desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan kewenangan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya lainnya di daerah, namun tetap diikuti transfer dari pemerintah pusat. Besarnya transfer dana ke daerah dan kemungkinan peningkatan penerimaan diharapkan memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih tepat sasaran, intervensi dari pemerintah di tingkat atas relatif minim, sehingga daerah lebih mandiri mengambil keputusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bird dan Vaillancourt, (1998:4) menjelaskan konsep desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah.

1. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah (Dekonsentrasi).
2. Daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah pusat (Perwakilan).

3. Pelimpahan berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah (Devolusi).

Dari ketiga jenis desentralisasi tersebut, yang dianggap ideal yakni devolusi di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas baik secara administratif, politik maupun kewenangan-kewenangan di bidang ekonomi untuk menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan desentralisasi tanpa diberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah, maka tujuan dari pelaksanaan desentralisasi itu sendiri sulit tercapai. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan desentralisasi diperlukan kewenangan, terutama untuk mengembangkan potensi ekonomi.

Perlunya dilakukan pelimpahan wewenang, menurut Tiebout (1956:418) dalam Arham (2013) karena akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan lebih efisien. Alasan mendasar peningkatan kemampuan pelayanan tersebut karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna.

Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki alasan mendasar. Alasan-alasan ekonomi untuk dilakukan desentralisasi diantaranya untuk meningkatkan penyediaan barang publik pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, selanjutnya akan berimplikasi luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah juga makin menurun. Ananda (2002:26-27) menyebutkan bahwa ada dua

alasan ekonomi dilakukannya desentralisasi fiskal, yaitu; 1) Desentralisasi dilakukan untuk efisiensi alokasi sumberdaya, dimana keputusan tentang pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat, serta akuntabilitasnya lebih besar bila dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh karenanya desentralisasi lebih rasional daripada sentralisasi. 2) Meningkatkan kemampuan bersaing bagi pemerintah daerah, serta mendorong inovasi, sehingga pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Pada gilirannya berimplikasi dimana masyarakat menjadi lebih suka membayar kewajiban-kewajibannya (membayar pajak dan retribusi daerah) untuk pembiayaan pengadaan barang publik dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat bersangkutan, bahkan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pelayanan.

Selanjutnya, desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi karena pemerintah lokal (daerah) akan lebih efisien untuk kegiatan produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi (Oates, 1993:237; Musgrave, 1989:5, dan Wellisch, 2004:25). Selain itu menurut De Mello (2000) dengan membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat di daerah, desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sektor publik, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian layanan dan pembuatan kebijakan.

Sementara itu, Sidik (2009:540) menguraikan tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu;

1. Meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah.
2. Memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemandirian nasional.
3. Meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
4. Mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat diseluruh Indonesia, dan.
5. Memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Sejalan dengan argumentasi di atas Steffensen (2010:3) menyebutkan tujuan dari desentralisasi fiskal secara keseluruhan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi, dengan memperkuat hubungan antara layanan dengan permintaan masyarakat sesuai kebutuhannya, maka pemerintah daerah yang lebih dekat akan lebih responsif terhadap preferensi masyarakat lokal.
2. Peningkatan akuntabilitas keuangan, dengan membawa pemerintahan dan keputusan lebih dekat kepada masyarakat dalam hal pemilihan suara, pengaruh, pertukaran informasi, dan monitoring dan lain-lain lebih mudah dilakukan, dan.
3. Peningkatan efektivitas, akan meningkatkan kemungkinan memperkuat persaingan dalam penyediaan layanan publik antar daerah, sehingga dapat memobilisasi kontribusi warga, melakukan inovasi dan lain-lain.

Martinez-Vazquez dan McNab (2003) mengemukakan bahwa ada dua alasan mengenai efisiensi (ekonomi) desentralisasi fiskal, yaitu; Pertama, apabila pemerintah lokalnya cerdas dan mampu membaca keinginan konstituennya maka akan mudah dalam mengadaptasikan kebijakan pengeluarannya, sehingga dengan hal tersebut

dapat meningkatkan kesejahteraan individu. Kedua, pengeluaran ataupun pembelanjaan ditingkat lokal akan mendorong producer efficiency akibat pelayanan yang lebih murah untuk penyediaan infrastruktur.

Dari segi efisiensi, adanya desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah jauh lebih efisien ketimbang ditangani oleh pemerintah pusat, kemudian daripada itu, desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat dalam menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal pada kelanjutannya efisiensi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional (Oates, 1972:196). Pembuktian empiris hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Xie *et al.*, (1999), Akai dan Sakata (2002), Akai *et al.*, (2009), Lin dan Liu (2000), Ding (2007), Ismail *et al.*, (2004), dan Samimi *et al.*, (2010). Asumsinya, terjadinya pertumbuhan ekonomi juga akan berimplikasi terhadap perubahan struktur ekonomi dengan makin menurunnya kontribusi sektor primer, pada saat yang bersamaan sektor sekunder dan tersier memiliki peran lebih meningkat. Namun tidak semua kajian empirik menunjukkan pola yang sama, beberapa diantaranya menunjukkan sebaliknya, desentralisasi fiskal berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditemukan oleh Davoodi dan Zou (1998), Baskaran dan Feld (2009), Jin dan Rider (2010). Merujuk pada beberapa teori dan dikuatkan dengan bukti empiris di beberapa negara, makin diyakini bahwa desentralisasi sebagai sistem pemerintahan dapat memacu laju pembangunan ekonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, disamping mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat lebih nyata.

Ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sangat diperlukan bagi negara besar seperti Indonesia. Tidak mungkin semua urusan dilakukan secara terpusat, karena faktanya selama pemerintahan sentralistik ketimpangan distribusi pendapatan sangat tinggi, demikian juga ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa, Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Brodjonegoro *et al.*, (2001:3), dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah akan lebih efektif dan mampu untuk memenuhi pelayanan publik yang dibutuhkan, membangun sarana perekonomian serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengukuran desentralisasi fiskal pada dasarnya tidak memiliki ukuran tunggal, ada yang mengukur dari sisi penerimaan dan ada pula yang mengukur dari sisi pengeluaran, Akai dan Sakata (2002) menyebutkan bahwa desentralisasi dapat diukur dari dua aspek, yakni aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Penerapannya dapat secara sendiri-sendiri, misalnya hanya melihat dari sisi penerimaan atau melihat dari sisi pengeluaran. Selain itu dapat digunakan secara bersamaan dengan melihat sisi penerimaan dan pengeluaran secara paralel. Berdasarkan pada pengukuran itu, maka tulisan ini mengukur desentralisasi fiskal dari aspek pengeluaran dengan mengukur rasio pengeluaran (belanja daerah) kabupaten/kota terhadap PDRB masing-masing daerah otonom.

Perubahan Struktur

Pembangunan ekonomi pada mulanya diidentikkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita, dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi masalah-masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan akan terselesaikan dengan sendirinya melalui efek penetes kebawah. Namun pada kenyataannya kondisi ini sulit tercapai, justru yang muncul masalah ketimpangan wilayah, dan distribusi pendapatan makin melebar. Sekalipun per-

tumbuhan ekonomi makin tinggi akan tetapi ketimpangan distribusi pendapatan makin mencolok, ketidakseimbangan struktur ekonomi muncul berbarengan, perekonomian sektor pedesaan dan perkotaan menciptakan ketidakseimbangan.

Todaro (2000) mengemukakan dengan mengutip pendapat dari Lewis mengakui dimana kondisi pangsa pertanian akan semakin menurun seiring dengan peningkatan pangsa relatif sektor industri dan jasa karena proses transfer tenaga kerja dari sektor yang memiliki produktifitas rendah (pertanian) ke sektor yang produktifitasnya tinggi (sektor industri). Teori ini didasarkan pada dualisme kegiatan perekonomian, perekonomian dimulai dengan dua sektor, yakni sektor pertanian pedesaan dan sektor industri perkotaan. Sektor pertanian umumnya mempekerjakan pekerja dengan produktivitas marginal tenaga kerja pertanian hampir sama dengan nol, sementara sektor industri perkotaan sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan transfer pekerja keluar dari sektor pertanian meski tidak mengurangi produktivitas pekerja dalam perekonomian secara keseluruhan, kondisi ini disebut sebagai transformasi struktural ekonomi.

Perubahan struktur (pergeseran sektoral) mengandung makna terjadinya transformasi, bukan hanya dalam bentuk fisik atau tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan atau cara memperlakukan kegiatan produksi ekonomi. Istilah "struktur" dan "perubahan struktural" telah menjadi banyak digunakan dalam penelitian ekonomi, meskipun dengan makna yang berbeda dan interpretasi. Dalam ekonomi pembangunan dan sejarah ekonomi, perubahan struktural umumnya dipahami sebagai "pengaturan yang berbeda aktivitas produktif dalam perekonomian dan distribusi yang berbeda faktor produktif di antara berbagai sektor ekonomi, berbagai pekerjaan, wilayah geografis, jenis produk (Machlup, 1991: 76, dalam Silva dan Teixeira, 2008: 275).

Menurut Fisher (1935) transformasi struktural merupakan peralihan atau per-

geseran permintaan secara berangsur-angsur dari kegiatan sektor produksi primer (pertanian, pertambangan) ke sektor produksi sekunder (industri manufaktur dan konstruksi) dan ke sektor tersier (jasa), mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana. Oleh karena tingkat produktifitas dan laju pertumbuhan masing-masing sektor berbeda, kemudian terjadi pergeseran diantara peranan masing-masing sektor dalam komposisi produksi nasional. Dimana kontribusi sektor pertanian terhadap produksi nasional makin menurun secara relatif, sekalipun hasil produksi secara absolut bertambah.

Hampir semua negara sudah mengalami proses transformasi ekonomi termasuk di Indonesia, namun menurut Anderson dan Pangestu (1995) dalam Arham (2013) transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia bersifat semu, sebab penurunan peranan sektor pertanian tidak diimbangi berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian sebagai akibat daya serap tenaga kerja di luar sektor pertanian rendah, maka makin berat beban yang ditanggung sektor pertanian sehingga produktifitasnya makin rendah.

Melihat kondisi itu dalam konteks pelaksanaan desentralisasi diharapkan perubahan struktur ekonomi tidak lagi bersifat semu, namun perubahan struktur dalam arti yang sebenarnya terjadi disemua daerah, artinya perubahan struktur ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan merealokasi sumberdaya dari sektor produktifitas rendah ke sektor produktifitas tinggi (Fan, 2003). Hanya saja bila dilakukan pencermatan perubahan struktur yang diinginkan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi. Menurut Kuncoro (2006), proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam hal, perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa, selain itu perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun

reformasi kelembagaan. Hal ini biasa disebut sebagai perubahan struktur produksi, hanya saja perubahan struktur produksi dapat terlaksana manakala ada peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas faktor produksi yang digunakan dan juga karena dukungan perkembangan teknologi pada sektor tersebut. Implikasinya selama pertumbuhan ekonomi berlangsung, alokasi sumberdaya ke berbagai sektor mengalami perubahan.

Namun dalam prakteknya perubahan yang diinginkan tidak akan tercapai begitu saja tanpa "intervensi" pemerintah melalui kebijakan reformasi ekonomi. Perubahan struktur ekonomi yang didorong oleh kebijakan reformasi ekonomi secara empiris sudah dibuktikan oleh Valli dan Saccone (2009) di China. Reformasi ekonomi bukan hanya bertumpu di tingkat nasional akan tetapi juga diharapkan memiliki implikasi langsung ke daerah, diantaranya peranan transfer atau pemberian kewenangan pengelolaan fiskal yang lebih kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam hal alokasi akan menciptakan efisiensi ekonomi sehingga proses perubahan struktur akan tercapai. Loehr dan Manasan (1999:10) dengan adanya tanggung jawab bagi pemerintah daerah yang dipandu dengan aturan pemerintah pusat perubahan struktur akan efisien dengan adanya desentralisasi fiskal, atau desentralisasi fiskal memainkan peranan penting dalam menciptakan efisiensi perubahan struktur ekonomi.

Untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi, selain menggunakan teori Lewis, juga menggunakan teori Chenery (teori transformasi struktural). Chenery dan Syrquin (1975) memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan. Dalam proses pembangunan ekonomi yang berlangsung, transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambung-

an pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Secara umum proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: 1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), 2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan 3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Teori Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri. Analisis teori Pattern of Development yang dikemukakan oleh Chenery berfokus pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian mengalami penurunan, saat GNP/perkapita meningkat (Kuncoro, 2007:92).

Teori dasar Chenery dan Syrquin (1975) mengemukakan peranan suatu sektor dalam menciptakan produksi di suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perkapita (Y) dan jumlah penduduk (N) negara yang bersangkutan. Selain itu Chenery dan Syrquin (1975) mengukur pola perubahan struktur ekonomi dengan menambahkan variabel peranan impor dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$X = \alpha + \beta_1(\ln Y)^2 + \gamma_1 \ln N + \gamma_2 (\ln N)^2 + \sum \delta_i T_j \quad (1)$$

$$X = \alpha + \beta_1 \ln Y + \beta_2 (\ln Y)^2 + \gamma_1 \ln N + \gamma_2 (\ln N)^2 + \sum \delta_i T_j + \varepsilon F \quad (2)$$

$$X = \alpha + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 (\ln Y_i)^2 + \varepsilon \delta_i T_i + \varepsilon F \quad (3)$$

dimana:

F = Peranan impor dikurangi ekspor terhadap PDB

T_j = Menunjukkan periode analisis ($j = 1, 2, 3, \dots, 20$)

Teori Chenery dan Syrquin yang pertama (dengan menggunakan variabel pendapatan per kapita dan jumlah penduduk negara yang bersangkutan) diadopsi oleh Azis (1990), (1992) melakukan kajian berkaitan dengan pengaruh alokasi sumberdaya, serta pengaruh dana Inpres terhadap perubahan struktur produksi perekonomian daerah di Indonesia dengan menambah variabel (kebijakan pemerintah) ke dalam model. Pendekatan yang akan dilakukan pada penulisan ini juga mengekspresikan teori dasar tersebut dengan mengikuti model yang ada dengan melakukan berbagai modifikasi, yaitu perubahan struktur (nilai tambah yang diciptakan sektor i) diganti menjadi pergeseran sektoral dengan menggunakan Structural Change Index di Sulawesi dan Jawa.

Berbagai studi yang telah dilakukan untuk menganalisis pergeseran dan peranan perekonomian di suatu daerah umumnya menggunakan analisis Shift-Share. Namun penggunaan analisis Shift-Share untuk melihat pergeseran sektor relatif memiliki kelemahan, maka untuk keperluan studi ini menggunakan alat analisis yakni, Structural Change Index (SCI). Sebuah metode yang umum digunakan untuk mengukur perubahan struktural dalam tingkat output (dan pekerja) atau koefisien (komposisi) perubahan struktural. SCI untuk output dapat didefinisikan sebagai setengah jumlah dari nilai absolut dari perbedaan nilai tambah share/sektor dari waktu ke waktu. Formulasi rumus dari perhitungan ini sebagai berikut (Jenissen, 1998; Jarjoura, 2001; Dietrich, 2009).

$$SCI = \frac{1}{2} \sum (X_{it} - X_{it-1}) \quad (4)$$

dimana X_{it} mewakili setiap kontribusi (share) industri dari total nilai kontribusi (share) masing-masing sektor pada waktu (t), dan ($t-1$) menunjukkan share periode sebelumnya. Penggunaan nilai absolut

memastikan bahwa positif dan negatif perubahan dalam saham industri tidak membatalkan satu sama lain ketika nilai dijumlahkan di industri. SCI dibatasi antara nol dan 100, dengan angka nol berarti tidak ada perubahan struktural, sementara 100 menunjukkan kebalikannya terjadi perubahan struktural secara lengkap (Janissen, *et al.*, 1998:69).

Selanjutnya dikembangkan model dengan mengacu pada studi empirik sebelumnya dengan menggunakan variabel pendapatan per kapita dan jumlah penduduk, kapasitas fiskal yang dilihat dari besar kecilnya celah fiskal yang dimiliki daerah otonom, ditambahkan dengan variabel desentralisasi fiskal (kebijakan transfer pemerintah) dalam bentuk dana perimbangan, atau biasa disebut dana PKPD dan NPKPD, diproksi dari desentralisasi penerimaan dan pengeluaran daerah (kabupaten/kota) yang menjadi unit analisis. Adapun formulasi model dasar yang akan dikembangkan sebagai berikut:

$$PS_{it} = \mu + \mu_1 VC_{it} + \mu_2 DF_{it} + \epsilon_{it} \quad (5)$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelatif komparatif. Penelitian korelatif untuk mencari keterkaitan hubungan fakta-fakta dalam fenomena yang diteliti kemudian mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena tersebut, seperti variabel-variabel dampak desentralisasi fiskal dan perubahan struktur. Penelitian komparatif yaitu sejenis penelitian deskriptif untuk mencari jawaban mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu (Nazir, 1999:68). Fenomena tersebut seperti keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan perubahan struktur ekonomi antar kabupaten/kota di Sulawesi dan Jawa. Objek penelitian ini adalah keuangan daerah dan perekonomian daerah kabupaten/kota di Sulawesi dan Jawa, dimana dikabupaten/kota dijadikan

sebagai objek, karena pelaksanaan otonomi daerah diletakkan pada daerah kabupaten/kota. Keuangan daerah tercermin dari struktur pengeluaran daerah dalam APBD setiap tahunnya di kabupaten/kota wilayah Sulawesi dan Jawa selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan periode tahun 2001 - 2010.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi dan Jawa sebanyak 187 dengan perincian masing-masing kabupaten/kota di provinsi sebagai berikut; Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 kabupaten/kota, Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 11 kabupaten/kota, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 12 kabupaten/kota, Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 kabupaten/kota, Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 kabupaten/kota, namun demikian untuk keperluan analisis kabupaten yang ada di provinsi ini masih digabungkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, karena Provinsi Sulawesi Barat baru resmi berdiri tahun 2004. Untuk kawasan Jawa, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten/kota, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 kabupaten/kota tidak dipilah per kota karena pengendalian anggaran (APBD) ada ditingkat provinsi, Provinsi Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten/kota, Provinsi Banten terdiri dari 8 kabupaten kota. Meskipun demikian tidak semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi dan Jawa dimasukan sebagai unit analisis, kabupaten/kota hasil pemekaran pada periode awal penelitian tidak termasuk di dalamnya, demikian juga kabupaten/kota yang ada DKI Jakarta tidak dimasukkan karena pembahasan dan penyusunan APBD berada di level provinsi, selain itu karakteristik perekonomian DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lainnya sehingga jumlah unit analisis kabupaten/kota sebanyak 150.

Keseluruhan data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode komputerisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan ditabulasi berdasarkan variabel ke-dalam tiga bentuk tabel, yaitu 1). Tabel untuk data dasar, 2). Tabel untuk data olahan, dan 3). Tabel hasil olahan atau hasil analisis yang akan disajikan dalam laporan. Sementara pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua software, yaitu MX-Excell untuk input dan olah data, dan Eviews 6.0 untuk estimasi parameter, pengujian asumsi dasar dan pengujian validitas model.

Model Empiris

Untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian ini maka digunakan alat analisis ekonometrika melalui model persamaan data panel. Model empiris perubahan struktur antar kabupaten/kota di Sulawesi dan Jawa dilakukan estimasi secara terpisah. Spesifikasi umum persamaan pergeseran yang diadopsi dari Chenery dan Syrquin (1975), Azis (1990) serta Bonet (2006), meskipun pada dasarnya model empiris dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti. Perubahan struktur ekonomi tersebut lebih menekankan pada sektor primer yang diproksi dari nilai sectoral change index kabupaten/kota, dengan asumsi bahwa kabupaten/kota di Sulawesi dan Jawa sektor pertanian berkontribusi paling besar terhadap pembentukan perekonomian wilayah, adapun model empiris yaitu sebagai berikut:

$$PS_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LnPDRBCap}_{it} + \alpha_2 \text{LnPOP}_{it} + \alpha_3 \text{KF}_{it} + \alpha_4 \text{FDEC}_{it} + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (6)$$

dimana:

- PS = Nilai perubahan sektor diproksi dari nilai pergeseran sektor
 LnPDRB = PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 (Rupiah)
 POP = Jumlah populasi (Jiwa)
 KF = Kapasitas fiskal

FDEC = Desentralisasi fiskal yang diproksi dari pengeluaran kabupaten/kota (persen)

i = Unit/Satuan Kabupaten/Kota

t = Periode waktu (t= 1, 2, 3... 10)

ε = Error term

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah data panel dengan serangkaian tahapan pengujian, yaitu Uji Statistik (Uji Kesesuaian Model). Pada umumnya, untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah baik atau tidak, biasanya tergantung pada; Nilai koefisien determinasi (R^2) Nilai (R^2) terletak antara nol dan satu. Jika nilai (R^2) semakin mendekati satu, maka model yang digunakan cukup baik karena variasi perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel independen, dan sebaliknya. Nilai F-test, F-test selain digunakan untuk melihat signifikansi parameter variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama juga digunakan untuk melihat goodness of fit suatu model. Disamping melakukan uji secara statistik, yaitu t-test (untuk uji parsial). t-test digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan antara nilai t-test dengan nilai t-tabel, hal tersebut akan diketahui. Kaidah pengujian dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_1 = 0 \text{ dan } H_a = \beta_1 \neq 0$$

Selanjutnya dilakukan uji ekonometrika, yaitu uji validitas model atau ketepatan model, yakni digunakan uji asumsi regresi klasik (classical regression linier model) guna mengetahui adanya penyimpangan terhadap asumsi-asumsi regresi linier klasik, antara lain uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Perbedaan paling mencolok antara dua kawasan (Sulawesi dan Jawa) dilihat dari

aspek demografinya, separuh jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Perkembangan jumlah penduduk suatu negara (termasuk daerah) memiliki implikasi positif bertambahnya jumlah penduduk akan menambah potensi kekuatan sumberdaya manusia, atau dapat diasumsikan bahwa makin banyak jumlah penduduk potensi untuk mendapatkan penerimaan daerah makin besar. Selain itu, dengan jumlah populasi yang besar berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dari sisi permintaan, serta mendorong permintaan domestik.

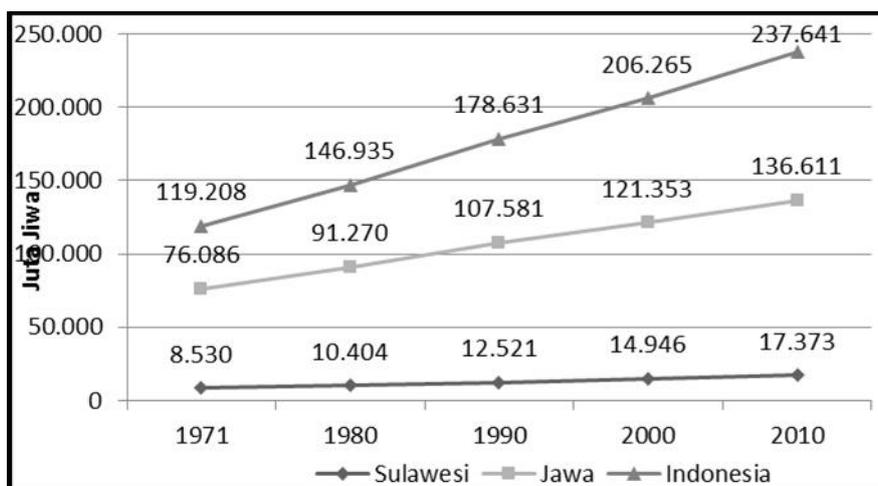
Hanya saja semakin besar jumlah penduduk suatu daerah semakin besar kebutuhan fiskal daerah untuk memenuhi pelayanan dan penyediaan barang publik. Apalagi penyebaran dan pertumbuhan penduduk di suatu daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda untuk memenuhi ketersediaan dan peningkatan pelayanan fasilitas. Dalam kaitannya dengan itu, variabel jumlah penduduk selalu menjadi pertimbangan penting dalam proses pembangunan. Seluruh aktifitas pembangunan ekonomi berkaitan dengan perilaku penduduk, seperti peningkatan taraf hidup penduduk, perbaikan pendapatan perkapita atau daya beli masyarakat, berkaitan de-

ngan penyediaan fasilitas dan pelayanan publik semua mempertimbangkan besar kecilnya jumlah penduduk.

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi dan Jawa dibandingkan dengan total penduduk Indonesia sejak sensus penduduk dilakukan pada tahun 1971 hingga tahun 2010 dapat disimak pada gambar 1.

Gambar 1 menggambarkan perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi dan Jawa menurut hasil sensus penduduk sejak tahun 1971 sampai hasil sensus penduduk tahun 2010. Hasil sensus penduduk 1971 penduduk wilayah Sulawesi sebanyak 8,5 juta jiwa atau 7,16 % terhadap total penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa 76 juta jiwa atau 63,83 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk pada tahun 1980 penduduk wilayah Sulawesi sebanyak 10,4 juta jiwa atau 7,08 % dari jumlah penduduk Indonesia, Penduduk Pulau Jawa sebanyak 91,2 juta jiwa atau 62,12 % dari total penduduk Indonesia.

Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 1990, penduduk wilayah Sulawesi sebanyak 12,5 juta jiwa atau 7,01 % terhadap penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa sebanyak 107,5 juta jiwa atau 60,23% terhadap total penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 2000, penduduk



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (2014).

Gambar 1
Jumlah Penduduk Sulawesi dan Jawa Terhadap Indonesia (Juta Jiwa)

wilayah Sulawesi sebanyak 14,9 juta jiwa atau 7,25 % terhadap total penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa sebanyak 121,3 juta jiwa atau 58,83 % terhadap total penduduk Indonesia. Sedangkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk wilayah Sulawesi sebanyak 17,3 juta jiwa atau 7,31 % terhadap total jumlah penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa sebanyak 136,6 juta jiwa atau 57,49 % terhadap total penduduk Indonesia.

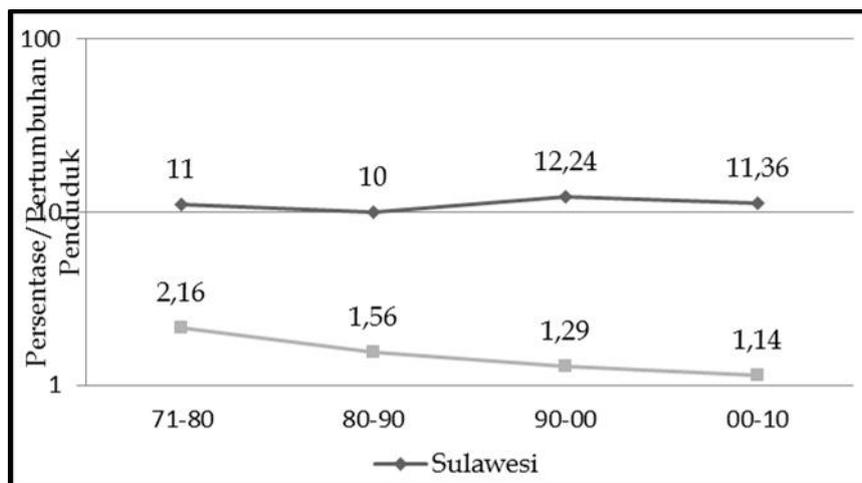
Selama lima kali pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia sejak tahun 1971 sampai sensus penduduk 2010, secara persentase penduduk di Pulau Jawa terhadap total penduduk Indonesia mengalami penurunan, sedangkan penduduk wilayah Sulawesi terhadap total penduduk Indonesia cenderung meningkat (Lihat Gambar 2). Provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Sulawesi, yaitu Sulawesi Tenggara sekitar 3 % setiap tahun, dan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduknya terendah di Sulawesi diantaranya Sulawesi Utara dan Gorontalo sekitar 1 % pertahun.

Gambar 2 menggambarkan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi dan Jawa, kurun waktu tahun 1971-1980 pertumbuhan penduduk Sulawesi sebesar 11%, Jawa

sebesar 2,16%, tahun 1980-1990 pertumbuhan penduduk Sulawesi sebesar 10 %, Jawa sebesar 1,56%, tahun 1990-2000 pertumbuhan penduduk Sulawesi sebesar 12,24%, Jawa sebesar 1,29%, dan tahun 2000-2010 pertumbuhan penduduk Sulawesi sebesar 11,36%, Jawa sebesar 1,14%. Meskipun pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa relatif kecil, namun penduduk Pulau Jawa tingkat populasinya lebih dari separuh penduduk Indonesia mendiami wilayah tersebut.

Kawasan Sulawesi

Berdasarkan hasil hausman test menunjukkan model yang tepat digunakan adalah fix effect model. Dimana model pendekatan yang diestimasi adalah faktor-faktor; Pendapatan perkapita (PDRBCap), karena faktor ini sebagai gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu negara (wilayah), makin tinggi tingkat pendapatan mengindikasikan bahwa perekonomian makin maju yang biasanya ditopang oleh sektor-sektor produktif (non primer). Jumlah populasi (POP), berkaitan erat dengan dinamika perekonomian, dengan asumsi jumlah penduduk produktif menjadi potensi penggerak ekonomi termasuk tingkat konsumsi meningkat akan mengubah struktur ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (2014).

Gambar 2
Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi dan Jawa (Persen)

Kemampuan fiskal (KF), setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda, secara umum daerah yang mengandalkan sektor primer sebagai penyumbang utama pembentukan ekonomi kemampuan (kapasitas) fiskalnya rendah.

Desentralisasi Pengeluaran Daerah (DESTEXP), pengeluaran (belanja) daerah merupakan instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian, apalagi bagi daerah yang minim investasi swasta, maka belanja daerah yang saat ini menjadi kewenangan penuh kabupaten/kota sangat berperan mendorong perubahan struktur ekonomi. Dari berbagai uraian tersebut, sejatinya faktor-faktor di atas diyakini dapat mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal. Perubahan struktur ekonomi diproksi dari sectoral change index, yang difokuskan pada sektor primer untuk memudahkan melakukan analisis, dengan asumsi bahwa bila nilai share sektor primer negatif maka sektor-sektor lainnya dianggap given positif (meningkat), dengan demikian terjadi proses transformasi ekonomi. Sebaliknya jika share sektor primer positif diduga sektor-sektor lainnya menurun, berarti cenderung tidak terjadi perubahan struktur ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan berbagai serangkaian pengujian, model yang digunakan lolos dari pelanggaran asumsi klasik (otokorelasi, heteroskedastisitas dan multi-kolonieritas), serta diikuti pengujian koefisi-

en determinasi menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan 63,49 persen dan lebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel pendukung ke dalam model. Sementara uji korelasi secara serempak kebijakan desentralisasi cukup berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi, dan uji parsial kebijakan desentralisasi nampak tidak berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi. Hasil penaksiran parameter-parameter perubahan struktur dapat disimak dalam tabel 2.

Secara makro, perekonomian kabupaten/kota di kawasan Sulawesi masih tertinggal dibandingkan dengan daerah otonom di Pulau Jawa, karena ada banyak kendala yang menghambat perekonomian wilayah Sulawesi. Namun pada dasarnya selama pelaksanaan otonomi daerah, kinerja perekonomian mengalami kemajuan diberbagai daerah otonom di kawasan Sulawesi. Pendapatan perkapita sebagai ukuran umum yang digunakan untuk melihat kinerja ekonomi berpengaruh terhadap menurunnya peranan sektor primer, dimana peningkatan pendapatan perkapita masyarakat cenderung menggeser kegiatan sektor, dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Demikian halnya penduduk (populasi) berpengaruh terhadap menurunnya peranan relatif sektor primer, hasil estimasi menggambarkan jika jumlah populasi me-

Tabel 2
Hasil Estimasi Kawasan Sulawesi

Koeffisien	Nilai	Statistik
LnPDRBCap	-0.270847	-1.815546*
Ln POP	-0.364995	-1.699244*
KF	-0.004602	-1.859295*
FDEC	-2.35E-05	-0.072333
Adj R-Squared	0.634954	
DW Stat	2.079718	

Keterangan: Signifikan *) 10 %, **) 5 % dan ***) 1 %

Sumber: Hasil Olahan Data Melalui Eviews 6.

ningkat maka akan mengakibatkan kontribusi sektor primer cenderung menurun, dengan demikian kenaikan jumlah penduduk di Sulawesi akan mendorong terjadinya proses perubahan struktur ekonomi dan diasumsikan peranan sektor-sektor lainnya meningkat selama kurun waktu penelitian. Penduduk merupakan variabel penting untuk dapat melakukan perubahan struktur ekonomi wilayah dengan asumsi mereka memiliki kemampuan produktifitas, namun bisa juga sebaliknya.

Kemampuan fiskal sebagai gambaran struktur ekonomi daerah otonom, secara faktual daerah otonom di Sulawesi masih banyak bergantung pada sektor primer, di mana wilayah-wilayah ini kapasitas fiskalnya relatif rendah. Dengan demikian kemampuan fiskal dan struktur ekonomi dapat saling berpengaruh secara resiprokal. Oleh karena itu kapasitas fiskal berdampak terhadap menurunkan sektor primer, pada saat yang bersamaan diasumsikan sektor sekunder dan kurang lebih sektor tersier juga meningkat. Lain halnya kebijakan desentralisasi fiskal dimana kewenangan melakukan perencanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi daerah otonom, setiap terjadi kenaikan rasio pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi.

Kawasan Jawa

Kondisi perekonomian kabupaten/kota di Jawa relatif sudah lebih maju dibandingkan dengan kawasan lainnya (Sulawesi), salah satu faktornya karena struktur perekonomian non primer sudah berkembang lama. Juga karena dipengaruhi oleh faktor populasi yang besar, Chenery dan Syrquin (1975) secara empiris menguraikan bahwa faktor populasi signifikan mendorong perubahan struktur produksi di suatu negara. Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, dimana jumlah penduduk yang banyak sebagai

potensi pasar (konsumen). Dengan demikian akan mendorong sisi permintaan sehingga akan mengembangkan sektor sekunder (manufaktur) di wilayah ini. Di mana kegiatan ekonomi sektor sekunder dan tersier cukup besar, jika dibandingkan dengan sektor primer (pertanian). Hasil estimasi menunjukkan kedua wilayah (Sulawesi dan Jawa) berbeda arah nilai koefisiennya, serta terdapat perbedaan variabel dominan yang mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi masing-masing wilayah.

Regresi parameter yang dilakukan, diikuti dengan pengujian ekonometrika dan statistik, dinyatakan lolos dari pelanggaran asumsi klasik, sementara uji statistik secara parsial pendapatan perkapita dan populasi tidak signifikan mendorong terjadi perubahan struktur ekonomi di Jawa, sedangkan kemampuan fiskal dan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan. Pengujian secara serempak menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perubahan struktur, dan koefisien determinasi menunjukkan bahwa model ini mampu dijelaskan oleh model sebesar 81,94 persen, dan sisanya dijelaskan variabel yang tidak termasuk dalam persamaan yang disusun. Hasil estimasi parameter-parameter dapat disimak pada tabel 3.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap perubahan struktur ekonomi daerah di Jawa, akan tetapi pengaruhnya lewat mekanisme atau variabel lain. Demikian juga populasi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap perubahan struktur ekonomi di Jawa. Sebagai daerah yang sudah mapan, serta struktur perekonomian cenderung lebih kuat sektor sekunder dan tersier kemampuan fiskal kabupaten/kota di Jawa pada umumnya kategori sedang dan tinggi sehingga kemampuan fiskal daerah di Jawa pengaruhnya sangat kuat untuk mendorong perubahan struktur ekonomi.

Tabel 3
Hasil Estimasi Kawasan Jawa

Koeffisien	Nilai	Statistik
LnPDRBCap	-0.178292	-0.569976
Ln POP	0.135992	0.467836
KF	9.23E-06	4.168110***
FDEC	-2.64E-06	-2.100642*
Adj R-Squared	0.819409	
DW Stat	2.946375	

Keterangan: Signifikan *) 10 %, **) 5 % dan ***) 1 %

Sumber: Hasil Olahan Data Melalui Eviews 6.

Kemampuan atau kapasitas fiskal yang tinggi memberikan dampak terhadap makin luasnya pemerintah daerah mendesain kebijakan pembangunan dan pengeluaran untuk mengalokasikan pada sektor-sektor produktif. Pada saat yang bersamaan kemampuan masyarakat membayar kewajibannya seperti membayar retribusi dan pajak cenderung juga tinggi, oleh karena itu hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dalam hal ini rasio pengeluaran pemerintah daerah di Jawa berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mulai berlaku efektif awal tahun 2001, untuk kawasan Sulawesi pendapatan perkapita cenderung makin meningkat sehingga memberikan dampak terhadap perubahan struktur ekonomi. Hal ini sejalan dengan hipotesis Fisher (1935), menyatakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan proporsi dalam sektor manufaktur (sektor sekunder) dan selanjutnya pada sektor jasa (tersier), terutama untuk ketenagakerjaan. Lain halnya di kawasan Jawa pendapatan perkapita tidak berpengaruh kuat (signifikan) terhadap perubahan struktur ekonomi.

Sebaran penduduk di Sulawesi cenderung masih timpang antar kabupaten/kota atau bahkan kawasan. Distribusi penduduk yang kurang merata biasanya cenderung akan menciptakan disparitas ekonomi, asumsinya dengan jumlah penduduk yang banyak memudahkan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif yang akan mendorong perkembangan perekonomian, selain karena tingkat konsumsi juga cukup tinggi sehingga berdampak terhadap permintaan. Populasi di Sulawesi berpengaruh terhadap proses transformasi ekonomi, sekalipun masih terjadi ketimpangan distribusi penyebaran penduduk. Untuk kawasan Jawa, populasi kelihatan tidak terlalu kuat memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur, karena luas lahan produktif dan kegiatan sektor pertanian makin terbatas sehingga tendensinya penduduk Pulau Jawa sebagian besar penduduknya terserap di lapangan kerja sektor non primer. Pada akhirnya kurang berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa. Hanya saja jika merujuk dari hasil studi Dirgantoro (2009), bahwa penurunan kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kontribusi tenaga kerja di sektor industri, tetapi diserap di sektor lainnya, seperti sektor informal.

Kemampuan fiskal antar daerah sangat timpang dan berbeda sebagai konsekuensi dari perbedaan endowment factor, selama

pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagian daerah mengalami peningkatan kapasitas fiskal, namun pada saat yang bersamaan sebagian besar justru menurun. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya peranan mekanisme transfer dari pusat seperti yang ditunjukkan oleh hasil studi Mahi (2006), menunjukkan bahwa selama tahun 2001-2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Proporsi transfer dari pusat terhadap penerimaan daerah masih yang terbesar dibandingkan dengan PAD. Namun pada dasarnya kemampuan fiskal daerah berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi baik di kawasan Sulawesi maupun Jawa.

Sementara desentralisasi fiskal yang diproksi dari rasio pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi tidak berpengaruh. Desentralisasi fiskal kurang memberikan efek terhadap kinerja perekonomian daerah kemungkinannya karena alokasi anggaran yang kurang tepat seperti yang dikemukakan oleh Bonet (2006), hal ini berkaitan dengan perilaku pengeluaran yang umumnya digunakan untuk upah dan gaji bukan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur, serta tidak adanya insentif yang memadai dari pemerintah pusat dan kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Sementara di Jawa kebijakan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi. Desentralisasi fiskal di kawasan Jawa diyakini akan memberikan pengaruh terhadap pergeseran sektor, dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, dengan kata lain proses pergeseran struktur ekonomi berjalan di daerah dimana pangsa relatif sektor sekunder dan tersier meningkat seiring

dengan menurunnya pangsa relatif sektor primer atau akan terjadi proses "transformasi struktural ekonomi". Selama proses itu terjadi percepatan pembangunan akan terakselerasi, sebagaimana yang kemukakan oleh Timmer dan de Vries (2008:16) bahwa percepatan pertumbuhan sebagian besar dijelaskan oleh peningkatan produktivitas dalam sektor, dan pasar jasa (tersier) dan manufaktur (sekunder) merupakan kontributor utama selama percepatan pembangunan di Asia dan Amerika Latin.

Jika dibandingkan dengan dua kawasan, ketimpangan masih sangat mencolok berdasarkan data indikator ekonomi. Hasil estimasi kedua wilayah juga memperlihatkan dengan jelas, kondisi perubahan struktur tendensinya juga berbeda perubahan struktur sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal lebih kuat terjadi di Jawa. Padahal diyakini bahwa desentralisasi fiskal mendorong terjadi perubahan struktur seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab menurut Bonet (2006:4), proses transformasi struktural ekonomi yang terjadi di negara berkembang juga dimaksudkan untuk mengurangi divergensi ekonomi, sebab negara yang masih mengandalkan sektor primer umumnya terjadi ketimpangan antar wilayah. Dalam proses pembangunan ekonomi pada mulanya didominasi oleh berbagai sektor kemudian terkonsentrasi secara dinamis pada sektor tertentu, ini merupakan indikasi bahwa terjadi proses transformasi yang dapat memberikan efek terjadinya penurunan ketimpangan regional.

Disamping itu, terjadinya perubahan struktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadi realokasi sumber daya dari sektor yang rendah produktifitasnya ke sektor yang produktifitasnya tinggi. Kecenderungan tersebut sama yang ditemukan oleh Fan *et al.*, (2003) di China bahwa pergeseran struktur ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktifitas, terutama di sektor non primer.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan penting, sebagai berikut:

(1). Kebijakan desentralisasi fiskal di Sulawesi tidak berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi selama pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa desentralisasi fiskal dalam aspek pengeluaran kurang mendorong terjadinya proses transformasi ekonomi di Sulawesi selama pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan faktor lain yang berpengaruh adalah pendapatan perkapita, jumlah populasi dan kemampuan fiskal. (2). Untuk kawasan Jawa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi, dengan kata lain terjadi proses perubahan struktur ekonomi, di mana pangsa relatif sektor sekunder dan tersier meningkat seiring dengan menurunnya pangsa relatif sektor primer. Oleh sebab itu di Jawa pola penganggaran terutama untuk stimulasi kegiatan sektor-sektor non primer perlu ditingkatkan disemua kabupaten/kota. Sedangkan faktor lainnya yang dominan mempengaruhi perubahan struktur adalah kemampuan fiskal (kapasitas fiskal) yang cenderung menguatkan peranan sektor pertanian.

Saran

Sementara saran-saran yang perlu disampaikan dari hasil penelitian ini, antara lain: (1). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Sulawesi dan Jawa. Variabel pengeluaran sebagai proksi dari desentralisasi fiskal terbukti kurang berpengaruh di kawasan Sulawesi dan sebaliknya di kawasan Jawa mempengaruhi pergeseran sektor (perubahan struktur). Dalam kaitannya dengan itu, pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi perlu melakukan perubahan struktur anggaran terutama sisi pengeluaran agar memiliki efek terhadap perubahan struktur ekonomi.

Menurut Bonet (2006), minimya efek desentralisasi pengeluaran karena sebagian besar anggaran terserap untuk gaji pegawai dan sektor non produktif. (1). Sekalipun otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur pengeluarannya sendiri, pemerintah pusat perlu memberikan indikator dan batasan minimum proporsi belanja langsung (belanja investasi dan belanja modal) lebih dari separuh dalam APBD melalui perundang-undangan atau peraturan pemerintah, sebab belanja tidak langsung hampir semua daerah jauh melampaui belanja langsung yang semestinya dapat memperbaiki kinerja ekonomi daerah, sekaligus mendorong terjadinya proses perubahan struktur ekonomi di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kelemahan studi ini ada beberapa variabel-variabel yang relevan mendorong perubahan struktur ekonomi seperti investasi dan indeks pembangunan manusia tidak dimasukkan. Variabel-variabel tersebut diduga berperan pada perubahan struktur baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya investasi maka sektor-sektor potensial di kawasan Sulawesi akan ada kegiatan produksi yang bernilai tambah, dengan sendirinya mendorong lahirnya industri-industri pengolahan baik berskala menengah dan besar. Hal serupa, dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan melahirkan serangkaian kegiatan ekonomi produktif yang tidak bersandar semata pada kegiatan sektor primer.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N. and M. Sakata. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics* 52(1): 93-108.
- Akai, N., Y. Nashimura, dan M. Sakata. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Volatility; Theory and Evidence from State Level Cross-

- Section Data for the United States. *Journal Japanese Review*. 60(2): 233-235.
- Ananda, C. F. 2002. *Problems of the Implementation of Fiscal Decentralization in Regional Autonomy: The Case of Malang Municipality and Trenggalek District*. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University of Maryland at College Park.
- Anderson, K. and M. Pangestu. 1995. *Agriculture and Rural Development in Indonesia into the 21st Century*. Research Report. Centre for International Economic Studies, Adelaide Australia.
- Arham, M. A. 2013. Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pergeseran Sektoral dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi dan Jawa. *Disertasi*. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Azis, I. J. 1990. Inpres Role in the Reduction of Interregional Disparity. *Asian Economic Journal* 4(2): 1-27.
- . 1992. Interregional Allocation of Resources: The Case of Indonesia. *The Journal of the RSAI* 71(4): 393-404.
- Bappenas RI. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Baskaran, T. and P. F. Lars. 2009. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship*. CESIFO Working Paper No. 2721. Diakses 15 Mei 2012.
- Bird, R. M., and F. Vaillancourt. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overview*. In Richard M. Bird and François Vaillancourt, eds. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bonet, J. 2005. *Decentralization, Structural Change and Regional Disparities in Colombia*. Urbana-Campaign, Regional Planning in the Graduate College University of Illinois.
- . 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from Colombia Experience. *The Annals of Regional Science* 40(3): 661-676.
- BPS. 2011. *Berita Statistika*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Brodjonegoro, B., M. Riatu, M. Karyaman, & I. Rozani. 2001. Model Ekonometrika Desentralisasi Fiskal: Analisa Dampak Alokasi SDA dan DAU Terhadap Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah, LPEM FEUI, *Paper Seminar*. Jakarta.
- . 2003. Dua Setengah Tahun Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Upaya untuk Mengurangi Kemiskinan dan Mendorong Investasi. *Paper*. Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Batu Malang. Jawa Timur.
- Caselli, F. dan W. J. Coleman. 2001. The U.S. Structural Transformation and Regional Convergence: A Reinterpretation. *Journal of Political Economy* 109(3): 584-616.
- Chenery, H. B., and M. Syrquin. 1975. *Patterns of Development 1950-1970*. London, Oxford University Press.
- Davoodi, H. and Zou, H. F. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics* 43(2): 244-257.
- de Mello Jr, L. R. 2000. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. *Journal World Development* 28(2): 365-380.
- Dietrich, A. 2009. Does Growth Cause Structural Change, or Is it the Other Way Round? A Dynamic Panel Data Analysis for Seven OECD Countries. *Jena Research Papers in Economics*.
- Ding, Y. 2007. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, 1994-2002. *Journal of Chinese Economic and Business Studies* 5(3): 243-260.
- Dirgantoro, M. A., S. Mangkuprawira, H. Siregar, dan B. Sinaga. 2009. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Ter-

- hadap Transformasi Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 5(1): 1-9.
- Fan, S., X. Zhang, dan S. Robinson. 2003. Structural Change and Economic Growth in China. *Journal Review of Development Economics* 7(3): 360-377.
- Fisher, A. G. B. 1935. Economic Implication of Material Progress. *Journal International Labor Review* 32(5): 682-688.
- Hammond, G. and M. S. Tosun. 2011. The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence from US Countries. *Journal of Regional Science* 51(1): 47-64.
- Ismail, A. G., H. Z. Hamzah, dan J. T. Rintonga. 2004. Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Selected Muslim Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9(2): 109-116.
- Janissen, B. 1998. *Aspects of Structural Change in Australia*. AusInfo, Canberra. Research Report.
- Jarjoura, G. 2001. Structural Change in Australia's Trade and Manufacturing Sectors: Progress and Problems. *Journal of Economic and Social Policy* 6(1): 1-28.
- Jin, Y. and M. Rider. 2010. Mark Fiscal Decentralization, Fiscal Equalization, and Economic Growth: A Comparative Study of China and India", Georgia State University, Working Paper Andrew Young School of Policy Studies.
- Kuncoro, H. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (edisi keempat), Yogyakarta, AMP YKPN.
- . 2007. *Ekonomika Industri Indonesia; Menuju Negara Industri Baru 2030*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Lin, J. Y. and Z. Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Journal Economic Development and Cultural Change* 49(1): 1-23.
- Litvack, J., J. Ahmad, dan R. Bird. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries. The World Bank, Washington. D. C. Diakses 20 Juni 2011.
- Loehr, W. and R. Manasan. 1999. Fiscal Decentralization and Economic Efficiency: Measurement and Evaluation. *CAER II Discussion Paper No. 38*, Harvard Institute for International Development, USA.
- Mahi, R. 2006, Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 6(1): 39-49.
- Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008*, dalam Abimanyu dan Megantara, (ed): *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Penerbit Kompas. Jakarta.
- Martinez-Vasquez, J. and R. M. McNab. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. *Journal World Development* 31(9): 1597-1616.
- Matsui, K. 2003. Decentralization in Nation State Building of Indonesia. (IDE-JETRO), *IDE Research Paper*. Senior Research Fellow, Institute of Developing Economies (IDE-JETRO), August.
- Musgrave, R. and P. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. International Edition, McGraw-Hill. Singapore
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- Oates, W. E. 1972. *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich. New York.
- . 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46(2): 237-243.
- Pemerintah RI. 2011. *Masterplan Percepatan, Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bappenas. Jakarta.
- Pepinsky, T. B. and M. M. Wihardja. 2009. *Decentralization and Economic Performance in Indonesia*. Cornell University and Centre for Strategic and International Studies.

- Samimi, A. J., S. K. P. Lar., G. K. Haddad, dan M. Alisadeh. 2010. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 4(11): 5490-5495.
- Sidik, M. 2009. Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004 dalam Abimanyu dan Megantara (ed.), Era Baru Kebijakan Fiskal, Penerbit Kompas. Jakarta.
- Silva E. G. and A. C. Teixeira. 2008. Surveying Structural Change: Seminal Contributions and a Bibliometric Account," *Structural Change and Economic Dynamics*, Elsevier 19(4): 273-300.
- Steffensen, J. 2010. *Fiscal Decentralization and Sector Funding Principles and Practices*. Danida. Denmark.
- Tiebout, C. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy* 64(5): 416-424.
- Timmer, M. P. and G. J. de Vries. 2008. *Structural Change and Growth Accelerations in Asia and Latin America: A New Sectoral Data Set*. University of Groningen, Netherlands.
- Todaro, M. P. 2000. *Economic Development* (seventh edition). Longman Group Ltd, New York.
- Wellisch, D. 2004. *Theory of Public Finance in a Federal State*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Xie, D., H. Zou, dan H. Davoodi. 1999. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics* 45(2): 228-239.
- Valli, V. and D. Saccone. 2009. Structural Change and Economic Development in China and India. *The European Journal of Comparative Economics* 6(1): 101-129.